

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,(1997), *Metode Penelitian Kualitatif*, Dirjen. Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta
- Becker, Howard S., (1988), *Sosiologi Pemjumpangan* , (Di Sadur : Soejono Soekanto dan Ratih Lestarini), Edisi Pertama, Cet. Pertama, CV. Rajawali, Jakarta
- Berger, Peter L.; Luckman, Thomas, (1990), *Tafsir Sosial atas Kenyataan – Risalah tentang Sosilogi Pengetahuan*, LP3ES, Jakarta
- Cooke Bill & Uma Kothari,(2001),*The Case For Participation as Tyranny*, Dalam Cooke. Bill & Uma Kothari(ed) *Participation as New Tyranny*, Zea Book, London.
- Chapline. J.P.,(2006), *Kamus Psikologi* (Terjemahan Kartini Kartono), Rajawali Pers, Jakarta
- Chandra, Eka, (2005) *Partisipasi Politik : Strategi Subsistensi Ekonomi Rumah Tangga*, Akartiga, Bandung
- Fromm, Erich, (1995), *Masyarakat yang Sehat* (Terjemahan : Thomas Bambang Murtianto), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Gerald C. Davison, John M. Neale, Ann M. Kring, (2006), *Psikologi Abnormal* (Terjemahan : Noermalasari Fajar), Edisi 9, Rajawali Pers, Jakarta
- Horton, Paul B., Hunt, Chesten L., (1994), *Sosiologi* (Terjemahan: Aminuddin Ram), Edisi keenam, Jilid 1 dan 2, Erlangga, Jakarta
- Hurlock, Elisabet B., (1997), *Psikologi Perkembangan- Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang* (Terjemahan: Iswidayanti), Cet. Keenam, Erlangga, Jakarta
- Johnson, Doyle Paul, (1994), *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Terjemahan: Robert M.Z. Lawang), Jilid 1 dan 2, Cetakan. Ketiga, Gramedia, Jakarta
- Mulyana, Dedy,(2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan. Pertama Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ndahara, Talizidudu, (1990), *Perkembangan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bineka Cipta, Bandung
- Parsons, Wayne, (2005), *Public Policy – Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan* (Terjemahan : Tri Wibowo Budi Santoso), Cet. Pertama, Prenada Media

- Poloma, Margaret M., (2003), *Sosiologi Kontemporer*, (Terjemahan : Tini Yasogania), Cet. Kelima, Rajawali Pers, Jakarta
- Sandtrock, John W.,(2006), *Adolescence – Perkembangan Remaja*, (Terjemahan: Shinto B Adelar dan Shorly Saragi), Edisi keenam, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, (1990), *Sosiologi Keluarga – Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Cet. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, (2003), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. ketiga puluh lima, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soeharto, Edi, (2006) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat – Kajian Sosiologi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Cet. Kedua, Retika Aditama, Bandung
- Suparjan dan Hendri Suyatno, (2003), *Pengembangan Masyarakat dan Pembangun Sampai Pemberdayaan*, Aditya Media, Yogyakarta
- Soedjito S., (1986), *Transformasi Sosial – Menuju Masyarakat Industri*, Cet. Pertama, Bayu Grafika, Yogyakarta
- UNDP, (1997), *Guide on Participation – Empowering People – A Guide to Participation*
- Weber, Max, (2006), *Sosiologi* (Terjemahan : Noor Khelis), Cet. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wirawan, Sarlito, (1994), *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta
- Howard S., (1988), *Sosiologi Pemjumpangan* , (Di Sadur : Soejono Soekanto dan RatihLestarini), Edisi Pertama, Cet. Pertama, CV. Rajawali, Jakarta

KONSEP MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA

A. Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Reformasi yang menggulirkan Undang-undang Otonomi Daerah dan melahirkan Paradigma Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial, telah menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab akan pentingnya partisipasi seluruh komponen masyarakat yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan sosial secara otonomi dengan mengacu pada tuntutan, masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat lokal khususnya generasi muda.

Dari satu sisi dorongan masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan aktifitas penanganan kenakalan remaja pada era otonomi daerah selain merupakan amanat undang-undang, juga lebih diorientasikan untuk membangun kepedulian sosial sebagai bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam membantu pemerintah. Pada sisi lain, komitmen dan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan usaha penanganan masalah kenakalan remaja.

Pada umumnya implementasi komitmen tanggung jawab sosial kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan usaha penanganan kenakalan remaja perlu di dorong agar lebih peduli dalam menangani kenakalan remaja dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Partisipasi masyarakat dapat mereduksi beban pembiayaan

pembangunan kesejahteraan sosial, keterbatasan jumlah kemampuan aparat sosial dalam menangani PMKS. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam usaha penanganan kenakalan remaja dapat dituangkan dalam wadah atau forum warga sebagai bagian dari aktifitas pengembangan komunitas terutama dalam menanggulangi kenakalan remaja.

Dari hasil penelitian tergambar bahwa sekitar tahun 1980 sampai awal tahun 2000 an, karang taruna pada Kelurahan Tamparung Keke pernah menjadi wadah aktifitas para remaja dalam mengisi waktu luang seperti kegiatan olah raga, rekreatif, percetakan/ sablon dan perbengkelan seni kerajinan tangan. Namun saat ini, aktifitas remaja karang taruna sudah tidak aktif lagi sebagaimana yang diharapkan hal ini menimbulkan pengaruh terhadap orientasi pergaulan diantara mereka yang masing-masing punya kelompok-kelompok sendiri sehingga kadang menimbulkan konflik diantara kelompok mereka, perilaku mereka yang pada akhirnya membentuk remaja berperilaku nakal baik yang putus sekolah maupun yang bersekolah. Selain itu, para remaja kurang mendapat pembinaan dan dukungan moril dari lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada terutama pemerintah kelurahan dan tidak mendapat perhatian dari dunia usaha dalam memanfaatkan dan memperkerjakan mereka oleh karena itu aktifitas remaja perlu diaktifkan kembali.

Karang taruna sebagai media yang dapat membina remaja, karang taruna dapat menjembatani para remaja melalui pembinaan dan pemberian pelatihan yang didukung oleh stakeholder seperti Dinas Sosial, Dinas

Pendidikan Nasional dan Dinas Tenaga Kerja khususnya melibatkan dunia usaha dalam meningkatkan keterampilan remaja dan penyerapan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan.

Instansi tersebut mempunyai tanggung jawab masing-masing dan saling berkoordinasi dalam pembinaan keluarga di tingkat kelurahan. Dunia usaha didorong untuk secara sadar untuk melibatkan diri dalam pembinaan remaja ke arah yang kreatif dan produktif yang didukung oleh masyarakat setempat sehingga dunia usaha dapat berpartisipasi dalam berbagai aktifitas pelayanan kesejahteraan sosial di era otonomi daerah. Dan juga diorientasikan untuk membangun kepedulian sosial sebagai bagian dari tanggungjawab dunia usaha dalam mengurangi beban pembiayaan pembangunan pemerintah untuk mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya kenakalan remaja yang dari tahun ke tahun bertambah semakin kompleks. Pada sisi lain, komitmen, kepedulian dan kemitraan dunia usaha dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pusat kesejahteraan sosial dengan memperkuat potensi dan sumber kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak sosial dan ekonomis bagi dunia usaha itu sendiri.

Pada umumnya implementasi komitmen, tanggung jawab, kepedulian dan partisipasi masyarakat mengatasi kenakalan remaja dan mengembangkan kepedulian sosial dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial masyarakat ini dapat menjadi bagian masyarakat dan instansi terkait dengan potensi remaja dan masyarakat di lingkungannya tanggap terhadap

permasalahan kenakalan remaja secara tidak langsung dapat mengajak, membina dan mengarahkan anak remaja lebih kreatif, produktif dan ekonomis sehingga kegiatan remaja dapat menjadi bagian integral dari program dunia usaha dari seluruh aktifitas bisnis ekonominya sekaligus dapat memberikan peluang bagi remaja anggota karang taruna untuk memperoleh latihan keterampilan kerja untuk menjadi pegangan dalam mencari pekerjaan sehingga dapat mengurangi timbulnya permasalahan kenakalan remaja bahkan dapat mencegah meluasnya perilaku kenakalan di kalangan remaja.

Dengan mengimplementasikan misi sosial dan misi ekonomi yang dikoordinasikan dengan instansi terkait secara profesional dan proporsional dalam usaha maka pada satu sisi pengusaha dapat membangun citra positif di kalangan para remaja dan masyarakat sehingga pada tahap selanjutnya berimplikasi pada peningkatan kepercayaan dan perluasan jaringan usaha di kalangan pemerintah daerah (setempat) dan masyarakat khususnya para remaja. Pada sisi lain, bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda, melalui karang taruna masyarakat dan instansi terkait dapat mendorong secara bersama-sama meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial para remaja. Sedang bagi pemerintah lokal kemitraan kerja dengan dunia usaha dan instansi lainnya dapat difungsikan sebagai sarana membangun jaringan komunikasi dan kemitraan kerja lintas sektoral yang diarahkan untuk mereduksi beban pembiayaan pembangunan kesejahteraan sosial. Keterbatasan jumlah kemampuan aparat dinas sosial

dalam menangani PMKS dan memecahkan masalah sosial lainnya terutama kenakalan remaja. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan usaha kesejahteraan sosial masyarakat dalam mengatasi kenakalan remaja dapat dituangkan dalam bentuk semiloka/sarasehan dan sosialisasi dan pendampingan sosial mengatasi permasalahan kenakalan remaja di Kelurahan Tamparung Keke Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

2. Pengertian

a. Partisipasi Masyarakat adalah :

Suatu proses kegiatan dimana kelompok-kelompok kelayan yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan proyek pembangunan dengan suatu pandangan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang meliputi peningkatan pendapatan perorangan atau kepercayaan diri. Partisipasi masyarakat ini meliputi keterlibatan penduduk dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dan membangun manfaat program pembangunan dan melibatkan mereka dalam setiap program.

b. Penanganan Masalah Kenakalan Remaja adalah :

Suatu kegiatan pemberdayaan remaja yang terorganisir untuk meningkatkan taraf hidup remaja yang mengalami permasalahan kenakalan.

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Kenakalan Remaja mencakup:

- 1) Penanganan Masalah kenakalan remaja dalam arti luas, yaitu mencakup fungsi pencegahan, rehabilitasi dan fungsi penunjang.
- 2) Penanganan dalam arti sempit mencakup program-program perlindungan dan pertolongan kepada remaja yang kurang beruntung.

3. Landasan Hukum

- a. Pancasila
- b. Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 (2) dan pasal 34 (1)
- c. Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- d. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- e. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- f. Keputusan Menteri Sosial RI tahun 2003, tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial

4. Kebijakan, Strategi dan Program

a. Kebijakan

Pada era otonomi daerah, keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktifitas pelayanan kesejahteraan sosial merupakan agenda kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks termasuk di dalamnya termasuk kenakalan remaja. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan dan peningkatan kemitraan kerja antara pemerintah dan masyarakat dengan melaksanakan partisipasi dalam penanganan kenakalan remaja maka akan dapat terbangun citra yang baik

hubungan antara pemerintah, masyarakat dan sasaran garapan (penyandang masalah kesejahteraan sosial). Karena adanya keterbatasan dana pemerintah jumlah dan kemampuan aparat sosial yang kurang maka dukungan masyarakat sangat menentukan jalannya program penanganan kenakalan remaja. Peran dunia usaha dalam melaksanakan berbagai aktivitas pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat merupakan agenda kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan dan peningkatan kemitraan kerja pemerintah daerah dan dunia usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan melaksanakan partisipasi dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat dapat digunakan oleh dunia usaha sebagai modal sosial untuk membangun citra yang baik sehingga, dapat berdampak pada perluasan jaringan dan keberlanjutan usaha, keuntungan ekonomi dan peningkatan *trust* baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu bagi pemerintah setempat partisipasi pengusaha dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) karena adanya keterbatasan dana, jumlah dan kemampuan aparat sosial.

b. Strategi

- 1) Kemitraan kerja antara pemerintah dan masyarakat baik (eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat).

- 2) Penguatan jaringan kerjasama dan koordinasi tripartite antara dunia usaha, pemerintah daerah dan masyarakat.
- 3) Partisipasi. Keikutsertaan aktif masyarakat dalam usaha penanganan kenakalan remaja merupakan salah satu kunci sukses dari penanganan masalah kenakalan remaja.
- 4) Responsibilitas. Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan usaha penanganan kenakalan remaja harus responsive sesuai tuntutan dan kebutuhan nyata dari masyarakat.
- 5) Keberpihakan. Menciptakan iklim yang kondusif dalam masyarakat untuk melaksanakan penanganan kenakalan remaja.
- 6) Keberlanjutan (*Sustainability*). Partisipasi masyarakat dalam penanganan kenakalan remaja dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dilaksanakan secara berkesinambungan, dan berkelanjutan. Partisipasi yang berkesinambungan tersebut akan mendorong terjadinya proses institusionalisasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Dengan demikian, aktivitas partisipasi pengusaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat diharapkan sudah menjadi bagian yang terintegrasi ke dalam program dunia usaha.
- 7) Efektivitas. Program partisipasi dalam meningkatkan usaha penanganan kenakalan remaja sehingga para remaja dapat mengubah kondisi kehidupannya yang lebih baik

- 8) Profesionalisme. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanganan kenakalan remaja harus dilakukan secara profesional, melembaga, terencana, terprogram dan berkelanjutan.

c. Program

- 1) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan usaha penanganan kenakalan remaja meliputi usaha dibidang pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, perumahan, dan tenaga kerja.
- 2) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan kenakalan remaja mencakup program perlindungan dan pemberdayaan.
- 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan usaha penanganan kenakalan remaja yang bersifat pencegahan.
- 4) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam usaha penanganan kenakalan remaja juga bersifat rehabilitasi dan pengembangan.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup konsep/rancangan model partisipasi masyarakat dalam meningkatkan usaha penanganan kenakalan remaja ditekankan pada:

- a. Pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang masalah kenakalan remaja, kepedulian, tanggung jawab sosial dan partisipasi sosial.
- b. Sikap perilaku peduli dan tanggung jawab sosial dalam mengatasi kenakalan remaja

- c. Partisipasi masyarakat dalam penanganan kenakalan remaja meliputi :
sumbangan materi, waktu, tenaga, pikiran, keahlian dan keterampilan
dukungan sosial, penyediaan fasilitas (sarana dan prasarana).
- d. Penguatan pelembagaan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial
lainnya.

B. Bentuk Kegiatan

Kegiatan semiloka/ sarasehan dari penelitian pengkajian model partisipasi masyarakat dalam meningkatkan usaha penanganan kenakalan remaja diformulasikan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah setempat, dinas sosial daerah.

Adapun bentuk kegiatan dari model partisipasi masyarakat dalam usaha penanganan kenakalan remaja adalah sebagai berikut ::

1. Sosialisasi
2. Sarasehan, yang berintikan kegiatan pembentukan kelompok kerja atau Forum Partisipasi warga masyarakat dalam usaha penanganan kenakalan remaja.
3. Bantuan Stimulan
4. Pendampingan sosial
5. Pemantauan (*Monitoring*) dan evaluasi

C. Tahap Intervensi

1. Tahap persiapan (*engagement*)

Pada tahap persiapan merupakan kegiatan awal untuk mengkoordinasikan persepsi dan langkah-langkah mengenai pendekatan

yang akan dipilih dalam melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi pengusaha dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperoleh legitimasi, dukungan dan fasilitas dari pemerintah setempat untuk melaksanakan kegiatan. Tahap ini sekurang-kurangnya mencakup empat tahap, yaitu (a) tahap persiapan tugas, (b) persiapan lapangan (c) tahap pembentukan kelompok kerja peduli terhadap pelayanan kesejahteraan sosial, dan (d) penyiapan masyarakat.

a. Penyiapan Petugas

1) Sasaran :

- a) Stakeholder mulai dari pemerintah daerah setempat, Dinas sosial Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, sampai kepada anak penyandang masalah kenakalan.
- b) Sosialisasi model partisipasi sosial masyarakat dalam meningkatkan usaha mengatasi permasalahan kenakalan remaja guna memperoleh dukungan dari masyarakat setempat.

2) Metode : Konsultasi, Wawancara dan Diskusi

- 3) Tujuan :
 - a) Mengidentifikasi dan menginventarisir jumlah, kemampuan, masalah dan kriteria anak nakal dan masyarakat sebagai sasaran garapan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam menangani permasalahan kenakalan anak/ remaja.

b) Diperolehnya persamaan persepsi antar instansi terkait, dan masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan.

4) Pelaksana : Instansi sosial provinsi dan kota/ kabupaten

5) Target : Diketuainya kebutuhan masalah, kemampuan dan kriteria masyarakat yang menjadi sasaran program.

b. Persiapan lapangan

1) Sasaran Subyek : Masyarakat dan tokoh pemuda

2) Sasaran Obyek : Persiapan penentuan rencana dan program, jadwal waktu kegiatan dan waktu kegiatan sarasehan, petugas fasilitator, sarana dan prasarana (akomodasi) serta panitia penyelenggara.

3) Metode : Dialog, konsultasi dan diskusi

4) Tujuan : Untuk memperoleh kelayakan terhadap masyarakat dan pemuda yang akan dijadikan sasaran garapan.

5) Pelaksana : Dinas Sosial Provinsi, Kota/Kabupaten

6) Target : Terbentuknya panitia penyelenggara beserta akomodasinya

c. Persiapan Pembentukan Kelompok Kerja

Pokja/forum/warga masyarakat yang peduli terhadap usaha penanganan kenakalan remaja. Pembentukan kelompok kerja dimaksudkan untuk menyelenggarakan usaha pembinaan terhadap masyarakat dalam menangani masalah kenakalan remaja secara profesional sebagai

gerakan masyarakat untuk menanggulangi masalah kenakalan remaja dan PMKS lainnya.

- 1) Sasaran subjek : Instansi terkait, masyarakat dan tokoh pemuda
- 2) Sasaran Objek : Pembentukan pokja masyarakat dan instansi terkait dalam usaha penanggulangan kenakalan remaja.
- 3) Tujuan : Terbentuknya pokja masyarakat dan instansi terkait sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penanganan kenakalan remaja.
- 4) Mengumpulkan masyarakat yang tergabung dalam pokja dengan instansi terkait sehingga termotivasi untuk melaksanakan usaha penanganan kenakalan remaja.
- 5) Setiap personil atau petugas dari instansi yang terkait yang tergabung dalam pokja.
- 6) Metode : Tatap muka, diskusi dan musyawarah.

d. Penyiapan masyarakat

Setelah persiapan petugas, persiapan lapangan dan pembentukan pokja selesai maka langkah berikutnya adalah penyiapan masyarakat sasaran garapan. Untuk melaksanakan penyiapan masyarakat ini petugas pelaksana/lapangan beserta sarana dan prasarannya. Dalam tahap ini dilakukan komunikasi dengan masyarakat sasaran garapan masyarakat dikondisikan dengan adanya kegiatan partisipasi masyarakat dalam usaha penanganan kenakalan remaja, sehingga pada kegiatan berikutnya

pelaksana kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik dan mencapai hasil yang efektif.

- 1) Tujuan :Pengenalan program sehingga masyarakat memiliki kesiapan fisik, sosial dan psikologi dalam menerima program usaha penanganan kenakalan remaja.
- 2) Pertemuan dengan masyarakat khususnya dikalangan remaja, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan tokoh formal.
- 3) Sasaran : Masyarakat khususnya generasi muda.
- 4) Pelaksana : Instansi terkait yang tergabung dalam pokja.
- 5) Metode : Konsultasi, ceramah, diskusi dan pendampingan

2.Tahap *Assessment*

Pada prinsipnya *assessment* (pengungkapan dan pemahaman masalah) merupakan kegiatan untuk memahami masalah sebab-sebab yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan dan akibatnya dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian tujuan dari *assessment* ini adalah : (a) mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat sasaran garapan, (b) menemukan dasar pikiran rasional bagi rencana intervensi, (c) memprediksi konsekwensi-konsekwensi bagi setiap alternatif tindakan usaha penanggulangan kenakalan remaja, (d) menemukan kemungkinan alternatif tindakan atau program pemecahan kenakalan remaja.

- a. Kegiatan : Identifikasi dan *assessment* masalah, *assessment* kebutuhan, *assessment* lingkungan dan lingkungan

sosial ekonomi sekitarnya serta peluang dan tantangannya.

- b. Sasaran subjek : Masyarakat dan tokoh pemuda
- c. Sasaran objek : Masalah, kebutuhan, tantangan dan peluang serta kemampuan yang dimiliki masyarakat dan instansi terkait yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan usaha penanggulangan kenakalan remaja.
- d. Metode : Identifikasi, wawancara, diskusi, seleksi dan registrasi.
- e. Tujuan : Teridentifikasinya informasi dan data mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai dasar untuk melaksanakan partisipasi dalam penanganan kenakalan remaja .
- f. Pelaksana : Dinas sosial Provinsi dan kabupaten/kota.
- g. Target : Ditemukannya alternatif program, metode, strategi atau formula partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kenakalan remaja.

3. Tahap diagnosis atau perencanaan program kegiatan.

Pada tahap ini pihak terkait melaksanakan perencanaan (memformulasikan) usaha penanggulangan kenakalan remaja. Dalam memformulasikan aksi kegiatan kepada masyarakat ini pihak terkait dapat menyusun tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang akan

dicapai melalui sarasehan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan berpedoman pada hasil *assessment* dan kearifan lokal.

- 1) Sasaran Subjek : Instansi terkait dan masyarakat.
- 2) Sasaran objek : Potensi/kemampuan masalah dan kebutuhan yang dihadapi dalam melaksanakan usaha penanganan kenakalan remaja.
- 3) Metode : Wawancara, diskusi dan dialog.
- 4) Tujuan : (a) terumuskannya rencana program dan kegiatan partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kenakalan remaja, (b) diperolehnya gambaran yang jelas tentang operasional kegiatan partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kenakalan remaja, (c) meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan usaha penanganan kenakalan remaja, (d) memberikan kemungkinan-kemungkinan mengubah/merevisi program untuk memperbaiki usaha penanganan kenakalan remaja.
- 5) Pelaksana : Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota
- 6) Target : Tersusunnya rencana program dan Kegiatan partisipasi masyarakat dalam usaha penanganan kenakalan remaja.

4. Tahap Implementasi

Tahap ini merupakan implementasi dari perencanaan program yang telah disusun pada tahap diagnosis untuk memecahkan masalah kenakalan remaja. Implementasi program ini akan mencapai hasil yang efektif dan efisien apabila instansi terkait dan masyarakat berpartisipasi dalam program ini.

Pada prinsipnya, tahap ini harus mengacu kepada hasil perencanaan program yang telah diformulasikan, sehingga aktifitas usaha penanganan kenakalan remaja dapat terpadu, terkendali dan sesuai yang diharapkan.

- a. Sasaran subjek : Instansi yang terkait dan masyarakat.
- b. Sasaran objek : Pemahaman, sikap kepedulian, tanggung jawab sosial dan partisipasi masyarakat dalam usaha penanganan kenakalan remaja.
- c. Metode : Sarasehan diskusi dan ceramah
- d. Tujuan : Tumbuh berkembangnya kesadaran, kepedulian, tanggung jawab sosial masyarakat dan diimplentasikan dalam wadah aktifitas partisipasi masyarakat dalam usaha penanganan kenakalan remaja.
- e. Pelaksana : Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/kota
- f. Terjadinya peningkatan kesadaran pemahaman, sikap kepedulian, tanggung jawab sosial dan partisipasi masyarakat dalam usaha

penanganan kenakalan remaja melalui pokja peduli terhadap usaha penanganan kenakalan remaja.

5. Bantuan Paket stimulan

- a. Tujuan : Menumbuhkembangkan motivasi masyarakat dalam berpartisipasi menangani kenakalan remaja.
- b. Sasaran : Terbentuknya pokja peduli usaha penanganan kenakalan remaja sebagai wadah partisipasi masyarakat.
- c. Metoda : Stimulasi, motivasi dan promosi
- d. Subyek : Instansi terkait dan masyarakat
- e. Target : Meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat dalam menangani kenakalan remaja.

6. Pendampingan Sosial

- a. Adanya keberlangsungan pelaksanaan program kegiatan penanganan kenakalan remaja.
- b. Sasaran : Kelancaran pelaksanaan program kegiatan penanganan kenakalan remaja
- c. Metoda : Monitoring, supervisi dan konsultasi
- d. Subyek : Pengurus Pokja Peduli penanganan kenakalan remaja.
- e. Target : Terwujudnya pengelolaan pokja partisipasi masyarakat dalam usaha penanganan kenakalan remaja secara profesional.
- f. Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten/ Kota

7. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi ini merupakan proses untuk mengetahui keberhasilan penanganan kenakalan remaja. Apabila hasilnya kurang efektif dan efisien (kurang berhasil) maka instansi yang terkait dapat melakukan analisis terhadap berbagai faktor penyebab kekurangberhasilan, sehingga dapat disusun kembali rencana partisipasi masyarakat untuk selanjutnya diimplementasikan. Namun apabila hasil evaluasi ini menunjukkan keberhasilan maka instansi terkait dapat melaksanakan kegiatan tahap berikutnya.

Dengan demikian pada dasarnya evaluasi dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan bagi kinerja partisipasi masyarakat dalam usaha penanganan kenakalan remaja. Evaluasi dilakukan mulai tahap input, proses, output dan outcome.

8. Tahap Terminasi

Apabila masyarakat dianggap mampu memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan aktivitas partisipasinya dalam penanganan masalah kenakalan remaja maka petugas instansi terkait (instansi sosial dan pendamping) dapat memutuskan kerja sama penanganan kenakalan remaja. Pada tahap terminasi dapat juga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi instansi terkait yang dianggap masyarakat sudah dapat mengatasi masalah kenakalan remaja.

D. Penutup

Program model rancangan partisipasi masyarakat dalam penanganan kenakalan remaja secara kelembagaan terprogram dan berkelanjutan dalam pelaksanaan berbagai aktifitas usaha penanganannya. Dalam implementasinya rancangan model partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penanganan masalah kenakalan remaja dapat berhasil dengan baik, efektif dan efisien apabila ada dukungan aktif dari peserta sarasehan, dukungan dan jalinan kerjasama/ kemitraan kerja dengan pihak-pihak terkaitserta dilaksanakan secara terpadu, terprogram, total dan tuntas (mampu menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja secara komprehensif) berkesinambungan dan berkelanjutan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN